

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, CV. Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1981.
- A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 89.
- Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence) Cetakan Ke-1 Agustus*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2009.
- Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- , *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Andi M. Sofyan, dkk., *Hukum Acara Pidana Edisi Ketiga*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Bambang Poernomo, *Pola dasar teori dan asas umum hukum acara pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Buchari Said dan Averroes, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2015.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- , *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009.

- M. Fauzan, *Peranan PERMA Dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Prenada Media, Jakarta. 2013.
- J.C.T Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang, dalam Jan Michiel Otto (et.all), Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan Edisi Pertama, Denpasar, 2012.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metofologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012.
- Lily Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1990.
- M. Adiguna Bimasakti, Dkk., *Hukum Acara peradilan elektronik (Pada peradilan Tata Usaha Negara)*, Spasi Media Publishing, Makassar, 2020.
- M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Alumni, Bandung, 2012.
- M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut dalam proses pidana*, PT Rineka cipta, Jakarta, 1991.
- M. Yahya Harahap, "*Arbitrase, Cetakan ke-1*", Pustaka kartini, Jakarta, 2016.
- , *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP Jilid 1*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Buku II Edisi Revisi*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003.

- Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006.
- Mochtar kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009.
- Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Muhammad Syarifudin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2020.
- Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengikat, Mengumpulkan, dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- , *Pengntar Ilmu Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Transito, Bandung, 1976.
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum)*, Politeia, Bogor, 1982.
- Rd. Achmad S. Soema Dipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1977. Dikutip dari bukunya D. Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

-----, *Hukum dalam jagat ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1992.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

-----, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 14, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Soesilo Yuwono, *Penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*, Alumni, Bandung, 1982.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018.

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015.

Van Hattum, *Hand en Leerboek van het Nederlanse Strafrecht I, S. Gouda uint D. Brouwer en Zoon*, Arnhem, Martinus Nijhoff, s' Gravenhage, 1953.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*, Aneka, Semarang, 1977.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem peradilan pidana (Konsep, komponen dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta 2014.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 tentang pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.: SE-MA/17 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983.

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia No. KMA/155/X/1981.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.

Surat Dirjen Badilum MARI No: 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference*.

Surat Jaksa Agung RI No: B049/A/SUJA/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19

Perjanjian Kerjasama pada tanggal 13 April 2020 antara Mahkamah Agung (Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020), Kejaksaan Agung (Nomor: KEP177/E/Ejp/04/2020) dan Kementerian Hukum dan HAM (Nomor: PAS08.HH.05.05 Tahun 2020) tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.

3. Sumber Lain

Arsil dan Lasma Natalia dalam [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd24fdd9edbc/beragam-hambatan-dalam-sidang-pidana-elektronik/?page=](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd24fdd9edbc/beragam-hambatan-dalam-sidang-pidana-elektronik/?page=1)

[1](#) diakses pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 22.24 WIB.

Data sebaran virus Covid-19, diakses dari <https://covid19.go.id/> pada tanggal 02 November 2020 pukul 19.33 WIB.

Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana, 2018, Volume 12, Nomor 2, hlm. 146. Diakses dan dikutip dari <http://dx.doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155> diunduh pada Senin tanggal 5 April 2021, Pukul 23.47 WIB.

Direktori Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Fira Saputri Yanuari, *Eksistensi Persidangan Elektronik dalam Perkara Pidana*, diakses dan dikutip dari <https://blog.heylaw.id/eksistensi-persidangan-elektronik-dalam-perkara-pidana/> pada tanggal 1 Juni 2021 pukul 7.36 WIB.

Galih Hartanto Putro, dkk., *Pelaksanaan Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana korupsi Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah*, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr> Vol. 1 No.4 Tahun 2012, diunduh pada Kamis tanggal 15 April 2021, Pukul 10.52 WIB.

Hasil wawancara dengan Abdul Gafur Bungin, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A.

Hasil Wawancara dengan Janu Widodo, S.H selaku Kepala Subseksi Pra-penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya.

Hasil wawancara dengan Iwan Ridjwan, S.H. selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kab. Tasikmalaya.

Hasil wawancara dengan Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua DPC PERADI Tasikmalaya.

Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/318/334> Vol. 14 No. 3 Tahun 2014, diunduh Pada Sabtu, tanggal 24 April 2021, Pukul 17.04 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Majalah *Varia Peradilan*, Nomor 36, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 1988.

Majalah *Varia Peradilan*, Nomor 103, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 1994.

Moch. Iwan Kurniawan, *Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:221/Pid.B/2019/PN.Bdg)*,

<http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal/article/view/14/13> ; Vol 1, No. 1

Tahun 2021, diunduh pada Jumat 9 April 2021, Pukul 10.28 WIB.

Pengadilan Negeri Karanganyar, “*E-Court, Era Baru Peradilan Indonesia*” diakses dari <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/1134-e-court->

[era-baru-peradilan-indonesia](#) pada tanggal 02 November 2020 Pukul 19.14 WIB.

Prianter Jaya Hairi, *Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi*, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2011.

Putusan Perkara No. 267/Pid.B/2020/PN Tsm

Putusan Perkara No. 263/Pid.Sus/2020/PN Tsm

Putusan Perkara No. 327/Pid.B/2018/PN Tsm

Putusan Perkara No. 103/Pid.Sus/2019/PN Tsm

R R Dewi Anggraeni, *Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, *Anggota Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) 10.15408/Adalah.V4i1.15264*, 4 (2020), 7–12.

Ruth Marina Damayanti Siregar, *Legalitas keterangan saksi melalui Teleconference sebagai alat bukti dalam perkara pidana*, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2015.

Shanti Riskawati, *“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”*, *VeJ*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2018.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A diakses di http://sipp.pn-tasikmalaya.go.id/index.php/detil_perkara, pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 5.48 WIB

Tim Penyusun Modul, *Buku informasi 04 – Modul Hukum Acara Pidana*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 2019.

Tim Penyusun Modul, *Modul Eksekusi*, Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2019.

Tim Penyusun Modul, *Modul Hukum Acara Pidana*, Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2019.

Tim Penyusun Modul, *Modul Penuntutan*, Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2019.